

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN RUMAH TANGGA DI KABUPATEN MINAHASA

**Tesalonika Chrisdiantien Dondo, Noortje Marsellanie Benu, dan
Elsje Pauline Manginsela**

Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi

ABSTRACT

The objective of research is to find out and analyze what factors influence the inequality of income distribution in Minahasa District. The study was conducted from April 2018 to January 2019. The data used in this study were secondary data during the period 2003 to 2017. Secondary data in this study were obtained from the Minahasa Regency Central Bureau of Statistics Agency and North Sulawesi Provincial Statistics Agency Agencies such as the Index Gini as one of the measures most often used to measure the level of overall income inequality, economic growth in 2003-2017, the number of poor people from 2003-2017, and the human development index for 2003-2017. The results showed that economic growth and the number of poor people in Minahasa District significantly affected the inequality of income distribution in Minahasa District. Whereas the human development index variable has no significant effect.

Keywords: *Inequality In Income Distribution, Household*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan disetiap negara. Upaya pemerintah meningkatkan tingkat kesejahteraan rakyatnya tercermin dari pertumbuhan yang dapat dicapai. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin baik pula tingkat kesejahteraan masyarakat (Khairul, 2016). Dengan kata lain, pembangunan ekonomi merupakan upaya sadar dan terarah dari suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pemanfaatan sumberdaya yang ada. Peningkatan kesejahteraan ini antara lain dapat diukur dari kenaikan tingkat pendapatan nasional atau laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi setiap tahunnya (Sukirno, 2006 dalam Bantika, V., 2015).

Seperti halnya dalam pembangunan ekonomi nasional, tujuan pembangunan

ekonomi daerah juga dimaksud untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pemerintah Daerah sebagai institusi pelaksana pembangunan di daerah juga memiliki tanggung jawab yang besar untuk meningkatkan kinerja perekonomian daerah serta memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat (Retnosari, 2006).

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakatnya untuk mengelola sumber daya yang ada serta membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan ekonomi dalam wilayah tersebut (Mudarajad Kuncoro, 2004 dalam Retnosari, 2006). Sehingga peran pemerintah bersama dukungan dari masyarakat sangatlah penting dalam mencapai kesejahteraan ekonomi suatu daerah. Karena itu, seluruh kegiatan pembangunan harus

difokuskan pada upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Selain pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan (income inequality) juga menjadi isu penting bagi pembangunan setiap negara. Secara teoritis dan didukung oleh banyak penelitian empiris terbukti bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi berdampak pada ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan berkaitan dengan pendapatan yang diterima oleh masyarakat disuatu negara. Semakin tinggi ketimpangan pendapatan berarti distribusi pendapatan dimasyarakat semakin tidak merata. Kondisi ini pada akhirnya akan memperbesar kesenjangan (gap) antara masyarakat dengan tingkat ekonomi relatif baik (kelompok kaya) dengan mereka yang berpendapatan rendah (kelompok miskin).

Pertumbuhan ekonomi akan lebih bermakna apabila dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata yang seringkali diikuti dengan perubahan struktur pendapatan, terutama bagi negara yang sedang berkembang. Masalah dihadapi di Indonesia adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat atau jumlah orang berada dibawah garis kemiskinan (poverty line) (Tambunan, 2001).

Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan merupakan sebuah realita yang ada ditengah-tengah masyarakat dunia baik di negara yang maju maupun negara berkembang yang juga merupakan isu penting untuk di tinjau dan perlu adanya berbagai upaya dari pemerintah dalam mengambil kebijakan guna meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat, serta peningkatan taraf hidup masyarakat melalui berbagai macam usaha dalam rangka peningkatan distribusi pendapatan dari berbagai macam aspek yang ada (Kalalo, 2016). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ketidak merataan distribusi pendapatan terjadi di seluruh dunia, jadi masalah ini juga terdapat pada negara-negara yang sudah maju namun yang terjadi di negara-

negara maju lebih kecil atau sudah tidak terlihat jelas dibandingkan yang terjadi pada negara-negara yang sedang berkembang.

Dalam hal ini, dibutuhkan peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan lapangan kerja dan usaha serta distribusi pendapatan yang merata dengan tujuan dapat meningkatkan kesejahteraan mutu hidup masyarakat. Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan semakin kecilnya tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk. Terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan rumah tangga membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Karena itu, aspek ketimpangan distribusi pendapatan rumah tangga ini juga mempunyai implikasi pula terhadap formulasi kebijakan pembangunan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Bank Indonesia menyatakan rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia ditahun 2017 berada diangka 5,05 persen. Angka tersebut sedikit lebih stabil jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi 2016 yang berada diposisi 5,02 persen. Indonesia sebagai negara sedang berkembang tidak lepas dari ketimpangan distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan masyarakat yang tidak merata dapat memicu terjadinya ketimpangan pembangunan ekonomi yang dapat dilihat jelas di tiap daerah-daerah dengan angka PDRB per kapita sesuai pengelolaan sumberdaya yang dimaksimalkan oleh tiap pemerintah daerah maupun masyarakatnya.

Berdasarkan data yang dihimpun seluruh BPS Provinsi Sulawesi Utara, PDRB Minahasa 2017 masih berada pada posisi terbesar kedua setelah Kota Manado, diikuti Bitung dan Minahasa Utara diurutan ketiga dan empat. Sebaliknya, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Kepulauan Talaud, dan Kabupaten Kepulauan SITARO menjadi daerah dengan perolehan PDRB paling rendah, yaitu posisi 15, 14, dan 13.

Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kabupaten/Kota se Sulawesi Utara, tahun 2017 (milliar rupiah)

No.	Kabupaten/Kota	PDRB 2017 (milliar rupiah)
1.	Manado	31.133,35
1.	Minahasa	14.496,50
2.	Bitung	14.048,45
3.	Minahasa Utara	11.448,97
4.	Minahasa Selatan	7.344,50
5.	Bolaang Mongondow	6.526,27
6.	Minahasa Tenggara	4.365,60
7.	Kepulauan Sangihe	3.664,84
8.	Tomohon	3.593,53
9.	Kotamobagu	2.933,22
10.	Bolaang Mongondow Timur	2.422,63
11.	Bolaang Mongondow Utara	2.103,41
12.	Kepulauan SITARO	1.950,66
13.	Kepulauan Talaud	1.919,78
14.	Bolaang Mongondow Selatan	1.727,72

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2018

Ditinjau dari sudut pandang lain, pertumbuhan ekonomi Minahasa mengalami pertumbuhan yang relatif sama dengan daerah lain. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa mengalami perlambatan pada tahun 2016 menjadi sekitar 6,10% hal ini disebabkan melambatnya kontribusi dari kategori pertanian yang memiliki kontribusi terbesar dalam perekonomian Kabupaten Minahasa.

Dinamika perkembangan perekonomian di Kabupaten Minahasa adalah dinamika yang terdiri dari seluruh rangkaian kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh semua unsur pelaku ekonomi pada semua strata yang ada di Kabupaten Minahasa. Ketimpangan pendapatan dalam pendistribusiannya menyebabkan terjadi kesenjangan antar golongan pendapatan, dimana besar kecilnya pendapatan yang diterima tentu sangat berpengaruh pada pola kehidupan masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa.

Berbicara tentang ketimpangan distribusi pendapatan suatu daerah tidak lepas dari adanya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya ketidakmerataan distribusi pendapatan di daerah itu sendiri antara lain ; pertumbuhan ekonomi merupakan acuan tiap pemerintah daerah dalam melihat laju pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu, indeks pembangunan manusia biasanya indeks yang menggambarkan kondisi harapan lama sekolah dan produk nasional bruto suatu masyarakat pada wilayah yang digunakan sebagai tolak ukur kesejahteraan suatu wilayah, serta jumlah penduduk miskin yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “faktor-faktor yang mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Rumah Tangga di Kabupaten Minahasa”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Di Kabupaten Minahasa.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Di Kabupaten Minahasa.

Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, dapat diperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat penelitian ini adalah landasan informasi bagi pemerintah di Kabupaten Minahasa dan dapat memberikan gambaran tentang hal apa yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan rumah tangga selama periode 2003-2017 yang

diharapkan dapat menanggulangi ketimpangan yang terjadi.

2. Menjadi bahan pembelajaran dan referensi pengembangan mengenai distribusi pendapatan rumah tangga.

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Minahasa. Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2018 sampai dengan bulan Januari 2019.

Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data dari Instansi BPS Kabupaten Minahasa dan BPS Provinsi Sulawesi Utara. Data yang diambil adalah data Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk Miskin dan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Minahasa. Data yang diambil difokuskan pada data Kabupaten Minahasa dan Provinsi Sulawesi Utara selama periode 2003-2017.

Konsepsi Pengukuran Variabel

Variabel-variabel yang akan diukur dalam penelitian ini adalah :

1. Pertumbuhan Ekonomi (%)
Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan, tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah diukur dengan pertumbuhan ekonomi.
2. Jumlah Penduduk Miskin (%)
Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan menurut BPS.
3. Indeks Pembangunan Manusia (%)
Indeks yang menggambarkan kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah yang digunakan sebagai tolak ukur kesejahteraan suatu wilayah.

Metode Analisis Data

Analisis Regresi Linier Berganda

Metode analisis yang digunakan oleh penelitian untuk mencari pengaruh antara variabel bebas dengan variabel tak bebas. Tujuan analisis ini adalah mengukur intensitas hubungan antara dua variabel atau lebih dan membuat prediksi perkiraan nilai Y atas X. Model regresi dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$= a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Dimana:

- : Ketimpangan Distribusi Pendapatan Rumah Tangga (Gini Rasio)
- a : Konstanta
- X₁ : Pertumbuhan Ekonomi (%)
- X₂ : Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)
- X₃ : Indeks Pembangunan Manusia (%)

Uji F

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel tak bebas secara keseluruhan. Dalam penelitian ini, hipotesis yang digunakan adalah:

- H₀ : Variabel-variabel bebas yaitu pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk miskin, dan indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya yaitu ketimpangan distribusi pendapatan rumah tangga (indeks gini).
- H₁ : Variabel-variabel bebas yaitu pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk miskin, dan indeks pembangunan manusia mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya yaitu ketimpangan distribusi pendapatan rumah tangga (indeks gini).

Dengan kriteria pengujian, yaitu:

- a. Apabila F hitung > F tabel, maka H₀ ditolak dan H₁ diterima.

- b. Apabila F hitung $< F$ tabel, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Uji t-statistik

Uji t-statistik digunakan untuk menguji pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel tak bebas secara parsial. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikan 0,05 atau 5%.

H_0 : Variabel-variabel bebas yaitu pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk miskin, dan indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya yaitu ketimpangan distribusi pendapatan rumah tangga (indeks gini).

H_1 : Variabel-variabel bebas yaitu pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk miskin, dan indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya yaitu ketimpangan distribusi pendapatan rumah tangga (indeks gini).

Dengan kriteria pengujian, yaitu:

- c. Apabila t hitung $> t$ tabel, maka H_0 di tolak dan H_1 diterima.
d. Apabila t hitung $< t$ tabel, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah fenomena statistik yang ditemui dalam permodelan regresi linier berganda dimana terdapat hubungan signifikan antara dua atau lebih variabel prediktornya. Akibatnya model regresi menjadi bias. Jika memasukkan variabel prediktornya yang memiliki hubungan yang erat antara variabel tersebut dalam satu model maka model tersebut menjadi redundan.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien diterima (R^2) digunakan untuk mengetahui sejauh mana ketepatan atau kecocokan garis regresi yang terbentuk dalam mewakili kelompok data hasil observasi. Koefisien determinasi menggambarkan bagian dari variasi total yang dapat diterangkan oleh model. Semakin

besar nilai R^2 (mendekati 1), maka ketetaannya dikatakan semakin baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Daerah Penelitian

Minahasa merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, terletak diujung utara Pulau Sulawesi. Ibukota Kabupaten Minahasa adalah Tondano Barat, berjarak sekitar 35 km dari Manado, Ibukota Provinsi Sulawesi Utara.

Kabupaten Minahasa berada di sebelah utara garis khatulistiwa yang terletak antara $0101'00''$ - $0129'00''$ Lintang Utara dan $12434'00''$ - $12505'00''$ Bujur Timur. Berbatasan dengan Laut Sulawesi disebelah utara, dengan Kota Manado dan Kota Tomohon disebelah selatan, dengan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di sebelah barat, dan dengan Laut Maluku, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Tomohon di sebelah timur.

Seiring semangat otonomi pada akhir tahun 2002, wilayah ini dimekarkan menjadi 2 kabupaten dan 1 kota, kemudian awal tahun 2003 dimekarkan lagi menjadi 2 kabupaten. Dengan demikian, Kabupaten Minahasa telah mekar menjadi 4 kabupaten dan 1 kota. Pada 20 tahun sebelumnya, Kabupaten ini telah dimekarkan menjadi Kota Bitung, bahkan Kota Manado. Luas wilayah Kabupaten Minahasa sendiri adalah berupa daratan seluas $1.141,64 \text{ km}^2$ dengan topografi bergunung-gunung yang membentang dari utara ke selatan.

Akhir tahun 2016, wilayah administrasi Kabupaten Minahasa terdiri dari 25 Kecamatan terdiri dari Kecamatan Eris, Kecamatan Kakas, Kecamatan Kakas Barat, Kecamatan Kawangkoan, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kecamatan Kawangkoan Utara, Kecamatan Kombi, Kecamatan Langowan Barat, Kecamatan Langowan Selatan, Kecamatan Langowan Timur, Kecamatan Langowan Utara, Kecamatan Lembean, Kecamatan Mandolang, Kecamatan Pineleng, Kecamatan Remboken, Kecamatan Sonder, Kecamatan Tombariri, Kecamatan Tombariri Timur, Kecamatan Tombulu,

Kecamatan Tompaso, Kecamatan Tompaso Barat, Kecamatan Tondano Barat, Kecamatan Tondano Selatan, Kecamatan Tondano Timur, Kecamatan Utara.

Kedaaan Rumah Tangga di Kabupaten Minahasa

Dapat dilihat pada Tabel 2, bahwa jumlah rumah tangga di Kabupaten Minahasa hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan namun tidak stabil, artinya masih mengalami fenomena angka yang naik-turun. Berawal dari tahun 2003 dengan jumlah rumah tangga sebanyak 70.043 ribu hingga akhirnya mencapai angka lebih dari 91 ribu rumah tangga.

Tabel 2. Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Minahasa tahun 2003-2017

Tahun	Jumlah (Ribu)
2003	70.043
2004	77.564
2005	-
2006	52.993
2007	85.808
2008	88.724
2009	89.926
2010	85.129
2011	85.214
2012	-
2013	88.329
2014	89.260
2015	90.166
2016	91.039
2017	-

Sumber : Data BPS Minahasa

Indeks Gini Rasio

Berdasarkan Tabel 4, BPS mencatat adanya ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Minahasa pada tahun 2003 sampai tahun 2017 menunjukkan terjadinya fluktuasi. Nilai Indeks Gini pada tahun 2003 sebesar 0,23 pada kategori ketimpangan rendah kemudian naik-turun angka Indeks Gini pada tahun selanjutnya hingga menjadi 0,35 pada tahun 2017. Ini mengidentifikasikan bahwa distribusi pendapatan di Minahasa tidak

stabil. Dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan yang terjadi selama 15 tahun terakhir yaitu dari tahun 2003 hingga 2017 masuk pada 2 kriteria yaitu $0 < G < 0,3$ yang berarti ketimpangan rendah dan $0,3 < G < 0,5$ yang berarti ketimpangan sedang.

Tabel 3. Indeks Gini Rasio Kabupaten Minahasa tahun 2003-2017

Tahun	Indeks Gini Rasio
2003	0,24
2004	0,32
2005	0,32
2006	0,32
2007	0,32
2008	0,29
2009	0,30
2010	0,37
2011	0,37
2012	0,41
2013	0,39
2014	0,38
2015	0,36
2016	0,36
2017	0,35

Sumber : BPS Minahasa, 2018

Berdasarkan Tabel 3, BPS mencatat adanya ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Minahasa pada tahun 2003 sampai tahun 2017 menunjukkan terjadinya fluktuasi. Nilai Indeks Gini pada tahun 2003 sebesar 0,23 pada kategori ketimpangan rendah kemudian naik-turun angka Indeks Gini pada tahun selanjutnya hingga menjadi 0,35 pada tahun 2017. Ini mengidentifikasikan bahwa distribusi pendapatan di Minahasa tidak stabil. Dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan yang terjadi selama 15 tahun terakhir yaitu dari tahun 2003 hingga 2017 masuk pada 2 kriteria yaitu $0 < G < 0,3$ yang berarti ketimpangan rendah dan $0,3 < G < 0,5$ yang berarti ketimpangan sedang.

Pertumbuhan Ekonomi di Minahasa

Dengan melihat Tabel 4, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa melaju sangat ce-

pat pada tahun 2012 yaitu 6,53 persen, dan mengalami perlambatan pada tahun pertama tahun 2008, pada angka 4,07 persen. Kemajuan ekonomi secara makro seringkali banyak dilihat dari besaran PDRB dan laju pertumbuhan ekonominya. Secara konsepsi, PDRB menggambarkan seberapa besar proses kegiatan ekonomi (tingkat produktivitas ekonomi) disuatu wilayah, yang dihitung sebagai akumulasi dari pencapaian nilai transaksi dari berbagai sektor ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

Tabel 4. Pertumbuhan Ekonomi di Minahasa Tahun 2003-2017

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2003	4,51
2004	5,59
2005	4,49
2006	4,65
2007	5,08
2008	4,07
2009	5,92
2010	6,24
2011	6,23
2012	6,53
2013	6,20
2014	6,39
2015	6,17
2016	6,07
2017	6,08

Sumber : BPS Minahasa, 2018

Penduduk Miskin di Minahasa

Dari Tabel 5, terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di Minahasa selama tahun 2003–2017 setiap tahun selalu mengalami perubahan-perubahan. Jumlah penduduk miskin paling tinggi pada tahun 2004, yaitu 45,96 persen, sedangkan jumlah penduduk miskin paling rendah terjadi pada tahun 2012, yaitu 22,90 persen.

Tabel 5. Jumlah Penduduk Miskin di Minahasa Tahun 2003-2017

Tahun	Jumlah Penduduk
-------	-----------------

	Miskin (%)
2003	41.40
2004	45.96
2005	23.80
2006	29.70
2007	30.50
2008	27.10
2009	25.70
2010	27.90
2011	24.90
2012	22.90
2013	28.50
2014	27.83
2015	28.88
2016	27.64
2017	26.34

Sumber : BPS Kab. Minahasa, 2018

Indeks Pembangunan Manusia di Minahasa

Dari Tabel 6, seperti telah dijelaskan bahwa pada tahun 2010 Indeks Pembangunan Manusia terjadi perubahan metodologi sehingga pada keadaan yang sebenarnya Indeks Pembangunan Minahasa terus mengalami kenaikan. Mulai dari tahun 2003 pada angka 71,03 kemudian sampai pada angka 74,59 pada tahun 2017.

Tabel 6. Indeks Pembangunan Manusia di Minahasa Tahun 2003-2017

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (%)
-------	--------------------------------

2003	71,03
2004	73,05
2005	74,00
2006	74,37
2007	74,68
2008	74,86
2009	75,28
2010	74,86
2011	70,38
2012	70,82
2013	71,94
2014	72,76
2015	73,59
2016	74,37
2017	74,59

Sumber : BPS Kab. Minahasa, 2018

Hasil Analisis Data

Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil olahan data menggunakan SPSS 23, nilai dimasukkan dalam model sehingga persamaan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$= 44,424 + 0,037 X_1 - 0,244 X_2 - 0,003 X_3$$

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan rumah tangga di Kabupaten Minahasa, dengan menggunakan variabel independen yaitu Pertumbuhan Ekonomi (X_1), Jumlah Penduduk Miskin (X_2), dan Indeks Pembangunan Manusia (X_3). Adapun analisis tiap-tiap variabel adalah sebagai berikut:

1. Variabel Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi di Kabupaten Minahasa selama periode 2003-2017 terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 6,53 persen. Peningkatan yang sangat tinggi di denominasi oleh sektor pertanian. Diketahui nilai koefisien parameter pertumbuhan ekonomi 0,037 ini berarti bahwa setiap kenaikan 1 pada pertumbuhan ekonomi maka indeks gini menjadi 0,037. Hal ini menunjukkan

bahwa pertumbuhan ekonomi (X_1) berpengaruh signifikan terhadap distribusi pendapatan rumah tangga.

2. Variabel Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa menunjukkan tidak lebih daripada angka 30 ribu penduduk miskin dengan jumlah rumah tangga mencapai 90 ribu rumah tangga artinya presentase penduduk miskin tidak mencapai setengah dari jumlah rumah tangga. Diketahui nilai koefisien parameter -0,244 ini berarti bahwa setiap kenaikan 1 pada jumlah penduduk miskin maka indeks gini menjadi -0,244. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan rumah tangga.

3. Variabel Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia menunjukkan nilai yang hampir stabil, selama periode 15 tahun terjadi sedikit ketidakstabilan namun tidak lebih atau kurang dari angka 70%. Diketahui nilai koefisien parameter -0,003 ini berarti bahwa setiap kenaikan 1 pada indeks pembangunan manusia maka indeks gini menjadi -0,003. Hal ini menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia (X_3) tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan rumah tangga.

Uji F

Hasil analisis regresi linier untuk menguji variabel bebas (X) yang akan mempengaruhi variabel terikat (Y) menggunakan SPSS di dapatkan $F_{hitung} = 12,238$ dengan tingkat signifikan p-value = 0,001 jadi pada 0,05 H_0 ditolak, karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ yang berarti variabel-variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi, penduduk miskin dan indeks pembangunan manusia secara bersama-sama berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan rumah tangga di Kabupaten Minahasa.

Uji t-statistik

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam model regresi yang sudah dihasilkan. Maka digunakan uji t untuk menguji masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Dari hasil uji t data dilihat bahwa:

1. Pertumbuhan ekonomi (X_1) dengan p-value = 0,001 pada 0,05 ini berarti H_1 diterima artinya pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan rumah tangga di Kabupaten Minahasa. Setiap kenaikan 1 pertumbuhan ekonomi maka indeks gini menjadi 0,037.
2. Penduduk miskin (X_2) dengan p-value = 0,048 pada 0,05 ini berarti H_0 diterima artinya jumlah penduduk miskin tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan rumah tangga di Kabupaten Minahasa. Setiap kenaikan 1 jumlah penduduk miskin maka indeks gini menjadi -0,245.
3. Indeks pembangunan manusia (X_3) dengan p-value = 0,450 pada 0,05 ini berarti H_0 diterima artinya indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan rumah tangga di Kabupaten Minahasa. Setiap kenaikan 1 indeks pembangunan manusia maka indeks gini menjadi -0,003.

Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah fenomena statistik yang ditemui dalam permodelan regresi linier berganda dimana terdapat hubungan tinggi antara dua atau lebih variabel prediktornya. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas dalam penelitian ini menggunakan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)*. Dalam hasil penelitian menggunakan SPSS 23 seperti pada lampiran 1, nilai VIF dari pertumbuhan ekonomi 1,202, nilai VIF pada penduduk miskin 1,145 dan nilai VIF pada indeks pembangunan manusia 1,137 artinya

tidak terjadi multikolinieritas ganda, antara variabel bebas yang diteliti ($VIF < 10$).

Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil perhitungan seperti pada lampiran 1, dapat dilihat bahwa nilai R Square yaitu 0.769 atau 76,9% artinya pengaruh semua variabel bebas pertumbuhan ekonomi, penduduk miskin, indeks pembangunan manusia pada ketimpangan distribusi pendapatan rumah tangga adalah sebesar 76,9% sisanya 23,1% di pengaruhi oleh variabel lain. Apabila melihat hasil pengujian R Square maka secara bersama-sama berpengaruh. Sedangkan secara uji parsial hasil yang di dapatkan berpengaruh tetapi negatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada uji parsial kontribusi variabel yang paling besar adalah variabel pertumbuhan ekonomi dan pada variabel lainnya memiliki kontribusi yang kecil dilihat dari nilai yang didapatkan adalah negatif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan variabel yang dianalisis yaitu pertumbuhan ekonomi, penduduk miskin, dan indeks pembangunan manusia yang memberikan pengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan rumah tangga di Kabupaten Minahasa adalah pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pada variabel penduduk miskin dan indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh signifikan. Apabila dilihat dari hasil pengujian R Square maka secara bersama-sama berpengaruh. Sedangkan secara uji parsial hasil yang di dapatkan berpengaruh tetapi negatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada uji parsial kontribusi variabel yang paling besar adalah variabel pertumbuhan ekonomi dan pada variabel penduduk miskin dan indeks pembangunan manusia lainnya memiliki kontribusi yang kecil dilihat dari nilai yang didapatkan adalah negatif.

Saran

Pemerintah diharapkan mampu mengejar pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Minahasa. Pemerintah dapat menopang usaha mata pen-

caharian masyarakat kecil seperti memajukan UKM, pemafaatan SDA, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan SDM masyarakat sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Minahasa. Pertumbuhan ekonomi perlu terus dipacu tanpa mengesampingkan distribusi pendapatan rumah tangga di suatu daerah khususnya di Kabupaten Minahasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnaturrohim, H. 2015. *Pengaruh Pendapatan Dan Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap Kopi Di Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung*. Universitas Negeri Semarang.
- Arsyad, Lincoln. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Yayasan Keluarga Pahlawan Negara. Yogyakarta
- Arka, S., & Yasa, I. K. O. A. 2015. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antardaerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali*. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan (Vol. 8, No.1).
- Bantika, V., Benu, O. L., & Kapantow, G. H. 2015. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Sulawesi Utara*. In CO-COS (Vol. 6, No. 17).
- Hajiji, A. 2010. *Keterkaitan antara Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, dan Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Riau 2002-2008* (Doctoral dissertation, Tesis).
- Hartini, N. 2017. *Pengaruh PDRB Per Kapita, Investasi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2015*. Universitas Negeri Yogyakarta. Skripsi.
- Holifah. 2017. *Faktor-Faktor Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2015*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Kalalo, T. Daisy E, Mauna M. 2016. *Analisis Distribusi Pendapatan Masyarakat Di Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. 16(1).
- Kuncoro, M. 2004. *Otonomi Dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta :Erlanggar.
- Laloan, B. F., & Kapantow, G. H. (2018). *Distribusi Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara*. AGRISOSIOEKONOMI (Vol. 14, No.2), 121-130.
- Mokoagow, M. M., Pakasi, C. B., & Tangkere, E. G. 2016. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Di Kabupaten Minahasa Utara*. In Cocos (Vol. 7, No. 1).
- Nurhada R., M.R.K Muluk, Wima Y, P. 2011. *Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011)*. Jurnal Administrasi Publik. (Vol. 1, No.4).
- Prapti, L. 2006. *Keterkaitan antara pertumbuhan Ekonomi dan distribusi pendapatan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota Jawa Tengah 2000-2004)* (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).
- Putri, Y. E. S. Amar, H. Aimon. 2015. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia*. Jurnal Kajian Ekonomi (Vol. 3, No. 6).
- Retnosari, D. 2006. *Analisis Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat*. Skripsi. Universitas Pertanian Bogor.
- Saragih, J. 2015. *Perencanaan Wilayah Dan Pengembangan Ekonomi Pertanian*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Salayang, Y, Laoh, O. E. H., & Kapantow, G. H. 2019. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Sulawesi Utara*. Universitas Sam Ratulangi Manado. *AGRI-SOSIOEKONOMI* (Vol. 14, No. 3), 339-346.

Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional*. Badouse Media. Padang.

Sukirno, S. 2006. *Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah Dan Dasar Kebijakan*. Kencana (Prenada Media). Jakarta.

Sugiyarto. J. H. Mulyo, R. N. Seleky. 2015. *Kemiskinan Dan Ketimpangan Pendapatan*

Rumah Tangga Di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Agro Ekonomi* (Vol. 26, No. 2).

Syamsuddin, H. 2010. *Perhitungan Indeks Gini Ratio Dan Analisis Kesenjangan Distribusi Pendapatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006-2010*. *Jurnal Paradigma Ekonomika* (Vol. 1, No. 4)

Todaro, M. Stephen S. 1999. *Pembangunan Ekonomi*. Terjemahan Oleh Erlangga. Jakarta : Erlangga.